

**LAPORAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN 2025**



Jalan Laut Nomer 25C Kendal



<https://disperkim.kendalkab.go.id>



(0294) – 381395



Disperkimkendal.it@gmail.com

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini memberikan gambaran pencapaian SPM pada Bidang urusan Perumahan Rakyat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan.

SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik bagi Pemerintah Daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi Pemerintah Daerah, SPM dapat dijadikan sebagai tolak ukur (benchmark) dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Teknis sebagai ujung tombak penerapan SPM yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara menerus seiring dengan intensipnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorietasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (*Standard Operating Procedure*), melainkan suatu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara agar dapat hidup sejahtera berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal atau tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, jenis pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi pemerintah Kabupaten/kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kendal memacu pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 067.1/375/2019 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal.

Dengan adanya Surat Keputusan Bupati tersebut, dimaksudkan untuk memudahkan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam berkoordinasi dan konsolidasi internal serta mencapai target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana batas waktu yang ditetapkan secara nasional dan bertujuan untuk memberikan landasan hukum kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam pengintegrasian rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Penetapan tim percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal dalam Surat Keputusan Bupati tersebut, telah dilakukan analisis terhadap pendistribusian tugas berdasarkan kemampuan dan potensi kepada tim teknis untuk mengawal

percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kendal. Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 12 ayat (1) tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
8. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 061/375/2019 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

Tabel 1.1 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Spm Bidang Perumahan Rakyat Dan Permukiman Urusan Tahun 2025

MISI KE- 3	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG (%)
Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan	Terpenuhinya akses hunian terjangkau. dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100
Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan	Terpenuhinya akses hunian terjangkau. dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100

Sumber : Dokumen RPJMD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

Tabel 1.2 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

Prioritas Kabupaten Kendal	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur Dasar	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Penyediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kemudahan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau dengan prasarana dan sarana utilitas memadai
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah.	

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

BAB II

PENERAPAN SPM

Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal

A. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan kegiatan paling awal dan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan SPM. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data, dan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana antara lain :

Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Kendal, pada tahun 2025 data berdasarkan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kendal 2021-2025 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.

2. Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Pada tahun 2025 menggunakan pendataan Identifikasi Potensi Lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota yang dilakukan pada tahun 2022. Lokasi identifikasi dilakukan di Kecamatan Gemuh, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Patean, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Rowosari, dan Kecamatan Kaliwungu. Luasan lahan yang diidentifikasi berkisar 0,19 – 5,38 Ha, dengan kondisi eksisting yaitu berupa sawah, tegalan, ladang, semak, tambak dan lapangan. Sedangkan untuk peruntukan ruang berupa kawasan permukiman.

3. Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Berdasarkan data rumah yang terkena bencana di Kabupaten Kendal pada tahun 2025, terdapat 35 unit rumah dengan kondisi rumah dengan kerusakan sedang hingga rusak berat. Terdapat 26 unit dengan kondisi rusak sedang di Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon, Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon, Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo, Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan, Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan, Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan, dan Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu. Singorojo. Selain itu, terdapat 9 unit rumah dengan kondisi rusak berat di Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon dan Desa Tamanrejo Kecamatan Kaliwungu.

4. Identifikasi Perumahan di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah pada tahun 2025 tidak dilakukan pendataan pada kegiatan tersebut.

5. Identifikasi Perumahan di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025 tidak ada pendataan identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota, dikarenakan tidak adanya anggaran pada kegiatan tersebut.

6. Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)

Identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten/kota (<10 Ha) berdasarkan pendataan baseline kumuh Kabupaten Kendal. Terdapat beberapa desa yang 17 (tujuh belas) desa yang termasuk ke dalam pendataan tersebut. Luas identifikasi perumahan yang berada di kawasan kumuh kabupaten/kota (<10 Ha) berkisar 1,21-16,83 Ha, dengan luasan paling kecil berada di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan dan luasan kawasan kumuh terluas berada di Desa

Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu. Tingkat kekumuhan berada di tingkat ringan, sedang dan tinggi.

7. Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota

Rumah yang terkena relokasi adanya program pemerintah di Kabupaten Kendal, merupakan relokasi daerah rawan bencana. Terdapat hanya 1 (satu) KK yang mendapat bantuan relokasi program pemerintah tersebut. Lokasi lahan relokasi tersebut berada di Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo. Masyarakat yang mendapat bantuan relokasi program pemerintah ini merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan memiliki lahan untuk dijadikan sebagai lokasi relokasi. Bantuan relokasi program pemerintah bagi masyarakat ini berupa penyediaan Rumah Layak Huni yang anggarannya berasal dari BTT APBD Kabupaten Kendal.

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

1. Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Kendal dilakukan pada 35 unit rumah. 17 unit rumah di Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon mengalami rusak sedang hingga berat akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2025, 3 unit rumah di Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo mengalami rusak sedang hingga berat akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada tahun 2025, 2 unit rumah di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan mengalami rusak sedang akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada tahun 2024 dan 2025, 1 unit rumah di Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan mengalami rusak sedang akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada tahun 2024, 1 unit rumah di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan mengalami rusak sedang akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada tahun 2024, 5 unit rumah di Desa Mororejo

Kecamatan Kaliwungu mengalami rusak sedang akibat bencana banjir yang terjadi pada tahun 2025, serta 6 unit rumah di Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon mengalami rusak sedang akibat bencana banjir yang terjadi pada tahun 2025. Kegiatan yang dilakukan akibat bencana tanah longsor tersebut adalah rehabilitasi rumah, pembangunan kembali dan relokasi rumah yang kegiatannya telah dilaksanakan pada tahun 2025.

2. Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena

Rumah yang terkena relokasi adanya program pemerintah di Kabupaten Kendal, merupakan relokasi daerah rawan bencana. Terdapat 1 (satu) KK yang mendapat bantuan relokasi program pemerintah tersebut. Lokasi lahan relokasi tersebut berada di Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo. Masyarakat yang mendapat bantuan relokasi program pemerintah ini merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan memiliki lahan untuk dijadikan sebagai lokasi relokasi. Bantuan relokasi program pemerintah bagi masyarakat ini berupa penyediaan Rumah Layak Huni yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Kendal. Seluruh lahan yang digunakan sebagai lokasi relokasi program pemerintah ini merupakan lahan legal yang dimiliki sendiri oleh penerima bantuan program ini.

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

1. Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana

Kegiatan layanan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana bersumber pada anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp 330.000.000,- untuk 16 unit rumah dan anggaran Baznas Kabupaten sebesar Rp 200.000.000,- untuk 10 unit rumah. Kegiatan layanan pembangunan kembali bagi masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Kendal bersumber pada anggaran APBD Provinsi sebesar Rp 400.000.000,- untuk 8 unit rumah.

2. Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program

Kegiatan layanan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terkena relokasi program kabupaten/kota bersumber pada anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp50.000.000,- untuk 1 unit rumah.

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Tahun-N Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak bagi korban

Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana telah dilaksanakan pada tahun 2025. Kegiatan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana ini, dilaksanakan pada 26 unit dengan kondisi rumah rusak sedang yang berada di 7 desa yaitu Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon, Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo, Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan, Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan, Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan, Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu dan Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon. Kegiatan pembangunan kembali rumah layak huni bagi korban bencana ini dilaksanakan pada 8 unit dengan kondisi rumah rusak berat yang berada di Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon dan Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo. Dengan demikian, pelaksanaan SPM Masyarakat yang Terkena Bencana di Kabupaten Kendal telah mencapai realisasi sebesar 100%.

1. Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun-N Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Rumah yang terkena relokasi adanya program pemerintah di Kabupaten Kendal, merupakan relokasi daerah rawan bencana. Terdapat 1 (satu) KK yang mendapat bantuan relokasi program pemerintah tersebut. Lokasi lahan relokasi tersebut berada di Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo. Masyarakat yang mendapat bantuan relokasi program pemerintah ini Bantuan relokasi program pemerintah

bagi masyarakat ini berupa penyediaan Rumah Layak Huni yang
anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Kendal.

BAB III

PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemda dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri 59/2021

Tabel 3.1 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan rakyat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah rumah yang tertangani akibat bencana	34 Unit	Setiap Tahun	Jumlah rumah yang tertanga ni akibat bencana	34 Unit	Setiap Tahun	APBD Kabupaten Kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi	Jumlah rumah yang layak huni bagi masyarakat	1 Unit	Setiap Tahun	Jumlah rumah yang layak huni	1 Unit	Setiap Tahun	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	at yang terkena relokasi program pemerintah daerah			bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah			

Sumber : Data Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Disperkim Kab. Kendal Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat di deskripsikan bahwa rencana target capaian Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan indikator capaian Jumlah rumah yang tertangani akibat bencana telah tertangani pada tahun 2025 untuk 35 (tiga puluh lima) unit rumah yang ada di Kabupaten Kendal dalam bentuk rehabilitasi rumah dan pembangunan kembali rumah dengan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp730.000.000,-, dan Baznas Kabupaten sebesar Rp200.000.000,-

Sedangkan untuk rencana target capaian Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota ditahun 2025 sudah terpenuhi bagi 1 (satu) unit rumah. Rumah yang terkena relokasi adanya program pemerintah di Kabupaten Kendal, merupakan relokasi daerah rawan bencana. Lokasi lahan relokasi tersebut berada di Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo. Anggaran relokasi program pemerintah ini berasal dari APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp50.000.000,-

3. Anggaran

Jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari: APBD, APBN, Sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yan Sah
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-	730.000.000	200.000.000
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	-	50.000.000	-

Sumber : Data Anggaran Pencapaian SPM Disperkim Kab. Kendal Tahun 2025

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2025 sebesar Rp 300.000.000,- dari Program Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut adalah pendataan terhadap rumah korban bencana sedangkan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana untuk pembangunan rumah korban bencana sebanyak 15 unit dengan total anggaran sebesar Rp300.000.000,- dengan masing-masing sebesar Rp 20.000.000,-. Alokasi anggaran juga bersumber dari BTT (Belanja Tidak Terduga) APBD Kabupaten Kendal sebanyak 9 unit yang terdiri dari rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan pembangunan kembali rumah layak huni bagi korban bencana dengan total anggaran sebesar Rp430.000.000,- dengan masing-masing Rp30.000.000,- untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana, dan Rp50.000.000,- untuk pembangunan kembali rumah layak huni bagi korban bencana. Selain itu terdapat alokasi anggaran yang bersumber dari BAZNAS Kabupaten Kendal sebanyak 10 unit berupa rehabilitasi rumah bagi korban bencana dengan total anggaran sebesar Rp200.000.000,- dengan masing-masing Rp20.000.000,- per unit.

Untuk SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersumber dari BTT (Belanja Tidak Terduga) APBD Kabupaten Kendal sebanyak 1 unit dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,-.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2025 sebanyak 9 orang. Berikut ini Tabel 2.3 rincian dukungan personil penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.

Tabel 3.3. Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah yg terlayani	Dukungan Personil
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah rumah yang tertangani akibat bencana	0	5
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	4
Jumlah			0	9

Sumber : Data Personil Penerapan SPM di Disperkim Kab. Kendal TA. 2025

5. Hasil Capaian

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal selama 1 tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

**Tabel 3.4. Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Kendal Tahun 2025**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (RP)		
		Targ et	Realisa si	Capaian (%)	APBD Kabupaten Kendal dan BAZNAS Kabupaten Kendal	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	34	34	100	930.000.000	930.000.000	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten / kota	1	1	100	50.000.000	50.000.000	100

Sumber : Data realisasi hasil capaian SPM Bidang Perumahan rakyat di Kabupaten Kendal TA. 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Kendal telah terlaksana, dengan capaian 100% bagi pemenuhan fisik dan 100% bagi pemenuhan anggaran, baik bagi anggaran yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kendal maupun Baznas Kabupaten.

Sedangkan pada kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Kendal telah terpenuhi capaiannya 100% baik pemenuhan fisik maupun anggaran.

**Tabel 3.5. Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan
Perumahan Rakyat Tahun 2025**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
		34	34	(34 : 34 x100%) = 100%	
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota				
		1	1	(1 : 1 x100%) = 100%	
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					(Total/Jumlah Mutu)

Sumber : Data realisasi capaian SPM Bidang Perumahan rakyat di Dindikbud Kabupaten Kendal
TA. 2025

**Tabel 3.6. Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Perumahan
Rakyat Kabupaten Kendal Tahun 2025**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Tuntas Paripurna

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten / kota	100	Tuntas Paripurna

Sumber : Data realisasi capaian indeks capaian SPM Bidang Perumahan rakyat Kabupaten Kendal TA. 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kendal tahun 2025, menurut Indeks SPM yang merupakan hasil dari nilai IP Layanan ditambah dengan IP Mutu menghasilkan nilai capaian 100 di masing-masing jenis pelayanan dasar. Dengan demikian kategori Indeks SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kendal Tahun 2025 termasuk ke dalam kategori Tuntas Paripurna.

Tabel 3.7. Capaian Target SPM Perumahan Rakyat

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	34	34	-	100
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	1	1	-	100

Sumber : Data Capaian Target SPM Perumahan Rakyat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Kendal telah terlaksana, dengan capaian 100% di 34 (tiga puluh empat) unit rumah. Sedangkan pada kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Kendal juga telah terpenuhi capaiannya 100%, yang merupakan relokasi daerah rawan bencana di Kabupaten Kendal.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Hambatan dan tantangan bagi Pemda dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik Internal maupun Eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut.

Tabel 3.8. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Kendal Tahun 2025

Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A. Perencanaan • Belum ada mekanisme dan tata cara penetapan status bencana daerah untuk tingkat kabupaten/kota. • Belum ada koordinasi antara Disperkim dengan BPBD sehingga pengumpulan data korban bencana masih sulit. Pengumpulan data masih berasal dari surat permohonan bantuan dari desa yang terkena bencana	Perlu adanya mekanisme dan tata cara penetapan status bencana daerah untuk kabupaten/kota.	1. Perlu peraturan yang menetapkan tentang kriteria status bencana di daerah. 2. Perlu koordinasi dan sinkronisasi antar OPD yang menangani bencana.
B. Koordinasi • Perlu penyamaan indikator bencana yang ada di SPM dengan indikator yang terdapat di BPBD (keselerasan bentuk bencana). Indikator ini	• Penyamaan indikator bencana yang ada di SPM dengan indikator yang terdapat di BPBD. • Adanya mekanisme	1. Perlu sinergitas atau Koordinasi antar OPD yang menangani kebencanaan 2. Perlu ada kejelasan mengenai siapa pihak yang menjadi

Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
diharapkan dapat menunjukkan kewenangan dan masing-masing dan pelaksanaannya. • Belum ada mekanisme pengajuan permohonan bantuan saat bencana dikaitkan dengan keterlibatan kemampuan keuangan daerah.	pengajuan permohonan bantuan saat bencana dikaitkan dengan keterlibatan kemampuan keuangan daerah.	leading sector dalam penanganan bencana karena nanti berkaitan dengan bentuk penanganan yang dilakukan, misal: apakah pemerintah hanya menyediakan lahan relokasi untuk korban bencana atau sampai membangun rumah, atau justru hanya memfasilitasi saja. 3. Perlu adanya mekanisme pengajuan permohonan bantuan saat bencana dikaitkan dengan keterlibatan kemampuan keuangan daerah.
C. Pelaksanaan • Kegiatan dilakukan setelah mendapat anggaran perubahan	Menunggu perubahan anggaran tahun 2025	Menunggu perubahan anggaran tahun 2025 4. Penerima bantuan korban bencana tidak

Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
Calon penerima bantuan harus masuk ke dalam DTSEN		harus masuk ke dalam DTSEN

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
1	2	3		4
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	1	Program Pengembangan Perumahan	980.000.000
		a	Kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	930.000.000
		b	Kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten / kota	50.000.000

Sumber : Data Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan rakyat Kab. Kendal Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana terdapat Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 980.000.000,-. Program tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 930.000.000,- dan kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten / kota dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000

BAB V

PENUTUP

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta ketetapan dari Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang menetapkan 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota.

Keberhasilan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal harus memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sehingga diharapkan target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan pada masing-masing Kementerian.

Dalam upaya tersebut telah dilakukan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Strategis perangkat daerah pengampu SPM.

Demikianlah Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kendal Tahun 2025, dan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kendal senantiasa terbuka terhadap saran masukan yang positif dari seluruh komponen masyarakat sehingga Kabupaten Kendal yang Semakin Sejahtera Secara Merata dapat segera terwujud.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridhonya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL



MUHAMAD NURHASYIM, ST, MM
NIP. 19700504 200501 1 010

LAMPIRAN

Tabel 2.1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanah Longsor	Tinggi	Plantungan	-	-	-	2.893	-	-	8.735	-	-	-	-
2	Tanah Longsor	Tinggi	Sukorejo	-	-	-	4.135	-	-	10.751	-	-	-	-
3	Tanah Longsor	Tinggi	Pageruyung	-	-	-	330	-	-	4.938	-	-	-	-
4	Tanah Longsor	Tinggi	Patean	-	-	-	3.667	-	-	7.932	-	-	-	-
5	Tanah Longsor	Tinggi	Singorojo	-	-	-	6.858	-	-	7.624	-	-	-	-
6	Tanah Longsor	Tinggi	Limbangan	-	-	-	4.472	-	-	7.435	-	-	-	-
7	Tanah Longsor	Tinggi	Boja	-	-	-	2.675	-	-	2.018	-	-	-	-
8	Tanah Longsor	Sedang	Kaliwungu	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-
9	Tanah Longsor	Sedang	Kaliwungu Selatan	-	-	-	1.067	-	-	301	-	-	-	-
10	Tanah Longsor	Tinggi	Brangsong	-	-	-	202	-	-	154	-	-	-	-
11	Tanah Longsor	Rendah	Pegandon	-	-	-	330	-	-	15	-	-	-	-
12	Tanah Longsor	Rendah	Ngampel	-	-	-	298	-	-	50	-	-	-	-
13	Tanah Longsor	Sedang	Gemuh	-	-	-	651	-	-	45	-	-	-	-
14	Tanah Longsor	Rendah	Ringinarum	-	-	-	264	-	-	51	-	-	-	-

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
15	Tanah Longsor	Tinggi	Weleri	-	-	-	1.290	-	-	554	-	-	-	-
16	Tanah Longsor	Rendah	Rowosari	-	-	-	236	-	-	-	-	-	-	-
17	Tanah Longsor	Rendah	Kota Kendal	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
18	Banjir Bandang	Tinggi	Pageruyung	-	-	-	11	-	-	30	-	-	-	-
19	Banjir Bandang	Tinggi	Patean	-	-	-	358	-	-	2.745	-	-	-	-
20	Banjir Bandang	Tinggi	Singorojo	-	-	-	813	-	-	3.836	-	-	-	-
21	Banjir Bandang	Tinggi	Limbangan	-	-	-	79	-	-	74	-	-	-	-
22	Banjir Bandang	Tinggi	Boja	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
23	Banjir Bandang	Tinggi	Kaliwungu	-	-	-	98	-	-	1.695	-	-	-	-
24	Banjir Bandang	Tinggi	Kaliwungu Selatan	-	-	-	807	-	-	6.924	-	-	-	-
25	Banjir Bandang	Tinggi	Brangsong	-	-	-	587	-	-	8.677	-	-	-	-
26	Banjir Bandang	Tinggi	Pegandon	-	-	-	415	-	-	3.571	-	-	-	-
27	Banjir Bandang	Tinggi	Ngampel	-	-	-	223	-	-	4.457	-	-	-	-
28	Banjir Bandang	Tinggi	Gemuh	-	-	-	311	-	-	8.104	-	-	-	-
29	Banjir Bandang	Tinggi	Ringinarum	-	-	-	1	-	-	86	-	-	-	-
30	Banjir Bandang	Tinggi	Weleri	-	-	-	61	-	-	1.675	-	-	-	-
31	Banjir Bandang	Tinggi	Rowosari	-	-	-	445	-	-	12.850	-	-	-	-
32	Banjir Bandang	Tinggi	Cepiring	-	-	-	234	-	-	9.314	-	-	-	-

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
33	Banjir Bandang	Tinggi	Patebon	-	-	-	556	-	-	9.055	-	-	-	-
34	Banjir Bandang	Tinggi	Kota Kendal	-	-	-	170	-	-	2.593	-	-	-	-
35	Banjir	Rendah	Plantungan	-	-	-	5	-	-	82	-	-	-	-
36	Banjir	Rendah	Sukorejo	-	-	-	775	-	-	16.106	-	-	-	-
37	Banjir	Rendah	Pageruyung	-	-	-	734	-	-	9.793	-	-	-	-
38	Banjir	Sedang	Patean	-	-	-	2.020	-	-	15.763	-	-	-	-
39	Banjir	Sedang	Singorojo	-	-	-	2.301	-	-	17.896	-	-	-	-
40	Banjir	Rendah	Limbangan	-	-	-	482	-	-	7.325	-	-	-	-
41	Banjir	Rendah	Boja	-	-	-	3.185	-	-	50.448	-	-	-	-
42	Banjir	Tinggi	Kaliwungu	-	-	-	3.778	-	-	56.481	-	-	-	-
43	Banjir	Sedang	Kaliwungu Selatan	-	-	-	2.805	-	-	44.043	-	-	-	-
44	Banjir	Tinggi	Brangsong	-	-	-	2.677	-	-	36.224	-	-	-	-
45	Banjir	Sedang	Pegandon	-	-	-	2.603	-	-	36.326	-	-	-	-
46	Banjir	Tinggi	Ngampel	-	-	-	2.148	-	-	34.575	-	-	-	-
47	Banjir	Sedang	Gemuh	-	-	-	3.071	-	-	49.965	-	-	-	-
48	Banjir	Tinggi	Ringinarum	-	-	-	2.162	-	-	33.346	-	-	-	-
49	Banjir	Tinggi	Weleri	-	-	-	2.134	-	-	54.840	-	-	-	-
50	Banjir	Tinggi	Rowosari	-	-	-	3.059	-	-	52.270	-	-	-	-

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
51	Banjir	Tinggi	Kangkung	-	-	-	3.526	-	-	47.764	-	-	-	-
52	Banjir	Tinggi	Cepiring	-	-	-	2.560	-	-	50.976	-	-	-	-
53	Banjir	Tinggi	Patebon	-	-	-	4.631	-	-	57.401	-	-	-	-
54	Banjir	Tinggi	Kota Kendal	-	-	-	3.068	-	-	55.754	-	-	-	-
Total *)							82.386	-	-	853.667	-	-	-	-

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kendal 2021-2025

Tabel 2.2. Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Gemuh	Sojomerto	0,45	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Tegalan Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman Pedesaan
	Gemuh	Sojomerto	0,27	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Sawah Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman Pedesaan
	Ngampel	Sudipayung	0,86	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Tegalan, ladang, tambak Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman Pedesaan
	Limbangan	Limbangan	0,75	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Tegalan Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman Pedesaan
	Singorojo	Cening	1,43	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Tegalan Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman Pedesaan
	Patean	Kalibareng	0,19	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Sawah Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman Pedesaan
	Plantungan	Mojoagung	0,27	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Tegalan, ladang Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman
	Rowosari	Gempolsek	2,65	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Tegalan Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman Pedesaan
	Rowosari	Sendang Sikucing	0,65	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Sawah Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman
	Rowosari	Sendang Sikucing	5,38	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Sawah Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman
	Rowosari	Sendang Sikucing	0,86	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Tegalan, ladang, dan semak Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman
	Kaliwungu	Mororejo	1,46	Masyarakat	Kondisi Eksisting : Lapangan Peruntukan Tata Ruang : Kawasan Permukiman

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.3. Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Banjir Bandang	2025	Patebon	Kebonharjo	17	-	10	7	17		
2	Tanah Longsor	2025	Sukorejo	Tamanrejo	3	-	1	2	3	-	-
3	Tanah Longsor	2025	Plantungan	Jurangagung	1	-	1	-	1		
4	Tanah Longsor	2024	Plantungan	Jurangagung	1	-	1	-	1		
5	Tanah Gerak	2024	Plantungan	Tlogopayung	1	-	1	-	1		
6	Tanah Gerak	2025	Plantungan	Wonodadi	1	-	1	-	1		
7	Banjir	2025	Kaliwungu	Mororejo	5	-	5	-	5		
8	Banjir	2025	Patebon	Kartikajaya	5	-	5	-	5		
9	Banjir	2025	Patebon	Kebonharjo	1	-	1	-	1	-	-

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.4. Identifikasi Perumahan di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

NO.	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sempadan Rel KA	NIHIL								
2	Daerah Sempadan Sungai									
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)									
4	Kolong Jembatan									
5	Permukiman Kumuh/Ilegal									
6	Daerah Rawan Bencana									
Total *)										

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.5. Identifikasi Perumahan di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman di Kabupaten/Kota

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	NIHIL								
Total *)									

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.6. Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kendal	Bandengan	7,86	433	530	Tinggi	
2		Karangsari	8,40	353	438	Tinggi	
3	Limbangan	Margosari	1,21	51	51	Ringan	
4		Pagerwojo	1,36	40	47	Ringan	
5		Tamanrejo	7,75	209	209	Ringan	
6		Limbangan	1,88	59	63	Ringan	
7	Kaliwungu	Kutoharjo	16,83	885	1002	Ringan	
8		Mororejo	7,90	318	318	Sedang	
9	Rowosari	Gempolsewu	2,08	136	171	Ringan	
10	Weleri	Tratemulyo	2,72	95	105	Ringan	
11	Sukorejo	Sukorejo	3,67	126	140	Ringan	
12	Patean	Pagersari	8,34	150	179	Ringan	
13		Curugsewu	6,52	175	185	Ringan	
14	Plantungan	Tirtomulyo	7,08	193	224	Ringan	
15	Boja	Boja	5,08	105	111	Ringan	
16		Meteseh	5,79	125	160	Ringan	
17		Bebengan	1,66	143	166	Ringan	

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.7. Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota

NO	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN /D ESA	R W	R T	JUMLAH RUMAH TERDAMP AK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
									MB R	NO N MB R	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Daerah rawan bencana	Sukorejo	Tamanrejo	4	7	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	0
Total *)						1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.8. Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

No.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYAN	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM
											M BR	NON M BR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDIAN GSEWA	RELOKASI / PEMBANGUNAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	1	5		AHMAD MUSTOFA	3324140912790000	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2025
2	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	1	5		AMININ	3324142407620001	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2025
3	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	2	5		AKHMAD MAHRURI	3324142305680001	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2025
4	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	2	5		SITI MUNYANAH	3324146807540001	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2025
5	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	1	5		SUHADAK	3324142612520002	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2025
6	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	2	5		SOCHIFAHTUN	3324145708760001	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2025
7	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	1	5		SRI MURYATI	3324144705570001	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2025
8	TANAH LONGSOR	2025	SUKOREJO	TAMANREJO	7	4		NUR HIDAYATUN	3324036507790004	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
9	TANAH LONGSOR	2025	SUKOREJO	TAMANREJO	7	4		DULHANAN	3324032009520001	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2025
10	TANAH LONGSOR	2025	SUKOREJO	TAMANREJO	7	4		MUSTAIN	3324031305800003	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2025
11	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	1	5		AKHMAD SOLIKHUN	3324142707900003	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
12	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	1	5		ALI IMRON	3324140305570002	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
13	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	2	5		SITI ARIFAH	3324144808590001	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
14	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	2	4		SUPA'AT	3324141012640001	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
15	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	2	4		ARIF	3324141907390001	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
16	BANJIR BANDANG	2026	PATEBON	KEBONHARJO	2	4		RUDI	3514082005840002	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2025
17	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	1	5		SRI WIDAD		-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
18	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	4	4		SOEDARJAH	3324145101650003	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
19	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	3	4		TARIYAH	3324144402610001	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
20	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	2	5		ABDUL WAHID	3324142712630002	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
21	TANAH LONGSOR	2025	PLANTUNGAN	JURANGA	4	2		PAWIT	3324011708580002	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
22	TANAH LONGSOR	2024	PLANTUNGAN	JURANGA	4	3		MUADZIN	3324010908670001	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
23	TANAH LONGSOR	2024	PLANTUNGAN	TLOGOPAYUNG	6	2		PARWADI	3324011306410001	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
24	TANAH LONGSOR	2025	PLANTUNGAN	WONODADI	7	1		SARDI	3324013112570005	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
25	BANJIR	2025	KALIWUNGU	MOROREJO	8	1		FATIMAH	3324084607600003	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
26	BANJIR	2025	KALIWUNGU	MOROREJO	6	5		MIPTAHUDIN	3324083005880004	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
27	BANJIR	2025	KALIWUNGU	MOROREJO	8	2		SRI LESTARI	3324086501550001	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025

N O.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	R W	R T	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM
											M BR	NO N M BR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAIN NYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDIAN G SEWA	RELOKASI / PEMBANGUNAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
28	BANJIR	2025	KALIWU NGU	MOROREJO	8	1		NURUL ANWAR	3324081811740002	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
29	BANJIR	2025	KALIWU NGU	MOROREJO	5	1		ROHMI	3324085211460002	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
30	BANJIR	2025	PATEBON	KARTIKAJAYA	2	2		ROCHMADI SRI SUHARTO	3325092706550002	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
31	BANJIR	2025	PATEBON	KARTIKAJAYA	2	2		RONI	3324143112600021	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
32	BANJIR	2025	PATEBON	KARTIKAJAYA	2	4		QOMARIYAH	3324145204670002	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
33	BANJIR	2025	PATEBON	KARTIKAJAYA	3	1		ZAENUROZI	3324142701770003	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
34	BANJIR	2025	PATEBON	KARTIKAJAYA	3	1		SARINTO	3324141505600002	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
35	BANJIR	2025	PATEBON	KEBONJARJO	5	2		AZIFATUL FAIZAH	3324145807760003	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2025
Total *)											35	0	0	26	9	35	0	0	26	8	0	1	0	

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.9. Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data Wilayah Administrasi Penanganan	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp (Biaya C1)
	1. Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)
	1. Pengisian Form A dan B	Surveyor	Orang*Hari
		Penggandaan Form	Eks
		Pengolahan Data	Orang*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
F.	Penyusunan Rencana Aksi		Rp (Biaya F1)
	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati	Konsumsi Rapat	Orang*kali
NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	Penerima dan jenis pelayanan	Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
	4. Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana		Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Tenaga Ahli	
		1. Tenaga Ahli Perencana	Orang*bulan
		2. Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*bulan
		3. Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*bulan
		4. Tenaga Ahli ME	Orang*bulan
		5. Tenaga Ahli Plumbing	Orang*bulan
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
		Survei lapangan	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.10. Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

N O.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMAT AN	KELURAHA N/ DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUAR GA	NI K	JUMLAH ANGGOT A KELUAR GA	KONDISI EKONOMI KELUARG A		LUAS BANGUN AN (M²)	LUAS TANA H (M²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN		
									MB R	NO N MB R			LEG AL	ILEG AL	MILI K	SEW A	LAINN YA	GAN TI ASE T	SUBSI DI SEWA	PENYEDIA AN RLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Daerah Rawan Bencana	Sukorejo	Tamanrejo	4	7	MUSTAI N			1		66,00		1		1					1
Total *)									1	0	66	0	1	0	1	0	0	0	0	1

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.11. Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder	
		Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data	
		Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Statistik	Orang*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Paket meeting	Orang*Kali
	2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Paket meeting	Orang*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
		Penyelenggaraan Sosialisasi	

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen	
		Penggandaan dokumen	Eks
5	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Konsumsi	Orang*Kali
		Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
	3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Konsumsi	Orang*Kali
		Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	
		Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Orang*Bln
		Transportasi	Orang*Hari
	4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Konsumsi	Orang*Kali
		Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
6	Subsidi Uang Sewa	Konsumsi	Orang*Kali
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
		Total Subsidi Uang Sewa	Rp

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Penggandaan dokumen	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Tenaga Ahli	
		Tenaga Ahli Perencana	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*Bln
		Tenaga Ahli ME	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing	Orang*Bln
	3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun	
		Biaya konstruksi	Rp
		Biaya MK	Rp
	5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah	
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Penggandaan dokumen	Eks
8	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan	
		Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Praktisi/ Narasumber	Orang*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Orang*Kali
		Survei lapangan	Orang*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
		Narasumber	Orang*Kali

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.12. Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN								
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rehabilitasi	26	Rp530.000.000	Rp330.000.000		Rp200.000.000						
2	Pembangunan kembali	8	Rp400.000.000	Rp400.000.000								
3	Penyediaan rumah relokasi											
	a. Pengadaan lahan											
	b. Pembangunan baru											
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana											
Jumlah *)		34	Rp930.000.000	Rp730.000.000		Rp200.000.000						

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.13. Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				TAHUN N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Subsidi uang sewa					
3	Penyediaan rumah layak huni	1	Rp50.000.000	Rp50.000.000		
Jumlah *)		1	Rp50.000.000	Rp50.000.000		

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

**Tabel 2.14. Rincian Capaian Pelaksanaan Spm Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Tahun-N
Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana**

NO	JENIS BENCANA	TAHUN TERJA DINYA BENCA NA	KECAMAT AN	KELURAHAN /DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI				
					TOTAL	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILI TASI	PEMBANG UNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILI TASI	PEMBANG UNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAY ANI
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BANJIR BANDANG	2025	PATEBON	KEBONHARJO	17	-	10	7	10	7	-	-	10	7	-	-	-
2	TANAH LONGSOR	2025	SUKOREJ O	TAMANREJO	2	-	1	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-
3	TANAH LONGSOR	2025	PLANTUN GAN	JURANGAGUN G	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
4	TANAH LONGSOR	2024	PLANTUN GAN	JURANGAGUN G	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
5	TANAH GERAK	2024	PLANTUN GAN	TLOGOPAYUN G	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
6	TANAH GERAK	2025	PLANTUN GAN	WONODADI	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
7	BANJIR	2025	KALIWUN GU	MOROREJO	5	-	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-
8	BANJIR	2025	PATEBON	KARTIKAJAYA	5	-	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-
9	BANJIR	2025	PATEBON	KEBONHARJO	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Total *)					34	0	26	9	26	8	1	0	26	8	1	0	0
Persentase layanan **)													100,00%				
Capaian SPM Total ***)													100				

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025

Tabel 2.15. Rincian Capaian Pelaksanaan Spm Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun-N Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	DESA	TARG ET				REALIS ASI			
				TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI
				(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana	SUKOREJO	TAMANREJO	1	0	0	1	0	0	0	1
Total *)				1	0	0	0	0	0	0	1
Persentase Layanan **)								100%			
Capaian SPM Total ***)								100			

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakyat, 2025